

EDISI : Kamis, 11 November 2019

KLIPING BERITA MEDIA CETAK KABUPATEN BULELENG



PENYUSUN :
SUB BAGIAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL
SETDA KABUPATEN BULELENG

RESUME BERITA

EDISI :Kamis, 14 November 2019

NO	NAMA MEDIA	JUDUL BERITA	RESUME	KET.
1	FAJAR BALI	Aparatur Kecamatan Dipacu Tingkatkan Kualitas Evaluasi APBDesa	Dinas pemberdayaan masyarakat dan desa kabupaten buleleng terus berupaya memacu dan meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan desa. Kali ini, dinas PMD Buleleng melaksanakan kegiatan in house training peningkatan kepastian bagi personil kecamatan dan sejumlah staf pada dinas PMD yang selama ini bertugas melakukan pembinaan dalam pengelolaan keuangan desa.	
		Sarasehan kepahlawanan, Pacu semangat Generasi bangsa	Guna memacu semangat generasi bangsa dalam upaya mengisi dan mempertahankan kemerdekaan Negara kesatuan republic Indonesia pemerintah kabupaten buleleng melalui dinas sosial. Kabupaten buleleng menggelar sarasehan tentang kepahlawanan serangkaian dengan peringatan hari pahlawan ke-74 hut ke-73 puputan margarana dan napak tilas perjuangan pahlawan nasional I gusti ngurah rai bertempat di monument perjuangan tri yudha sakti, selasa (12/11)malam lalu.	
2	NUSA BALI	Anggaran Disdikpora Dipangkas Rp 40 Miliar	Fokus pembangunan revitaliasasi pasar banyuasri, membuat sejumlah anggaran di masing-masing organisaasi perangkat daerah kabupaten buleleng dicitukan. Salah satunya dinas pendidikan pemuda dan olahraga buleleng paguanggaran di tahun 2020 dipotong rp 40 miliar. Pemotongan anggaran tersebut membuat sejumlah program disdikpora belum memiliki anggaran tdan terancam tidak bisa terlaksanakan.	

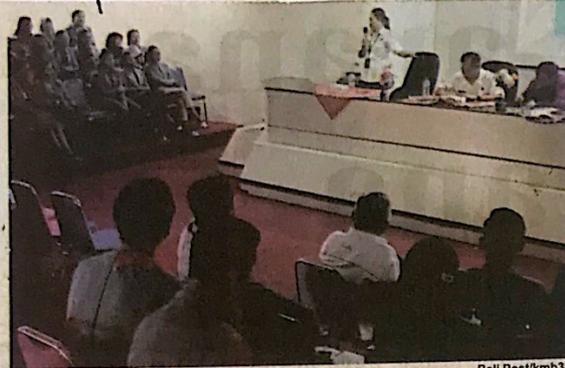
		Lahan Hotel Melka Dijadikan kantor Cabang PDAM	Lahan seluas 700 meter persegi yang selama ini dikuasai oleh hotel Melka, di Desa Kalibukbuk, kecamatan buleleng, berhasil diambilkan oleh pemkab buleleng. kini lahan tersebut diserahkan pada PDAM Buleleng untuk lokasi pembangunan kantor cabang.	
--	--	--	---	--



KLIPING BERITA MEDIA CETAK KAB BULELENG

Nama Media : *BALI POST*

Kategori : *NARKOTIKA*



Bali Post/kmb38

SOSIALISASI - BNNK Buleleng menggelar sosialisasi peredaran dan penyalahgunaan narkotika menasar mahasiswa Jurusan Biologi dan Perikanan Undiksha, Rabu (13/11) kemarin.

BNNK Sasar Kampus Ajak Mahasiswa Pecandu Narkotika Rehabilitasi

Singaraja (Bali Post) -

Kampanye pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan narkotika kembali digulirkan jajaran Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Buleleng. Mahasiswa Jurusan Biologi dan Perikanan Universitas Pendidikan Ganesha (Undiksha) Singaraja, Rabu (13/11) kemarin, disasar dalam sosialisasi kali ini.

Dari sosialisasi ini, BNNK mengharapkan partisipasi aktif mahasiswa dalam mengampayekan pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan narkotika itu. Salah satu caranya turut serta mengajak para korban penyalahgunaan narkotika mengikuti rehabilitasi.

Kepala BNNK Buleleng AKBP Gede Astawa mengatakan, latar belakang mahasiswa telah terpapar pengaruh buruk penyalahgunaan narkotika itu dibuktikan dengan relatif banyaknya kasus penyalahgunaan narkotika itu yang diungkap adalah berlatar belakang mahasiswa. Karena itu, pihaknya masuk ke kampus seperti di Undiksha ini. Apa yang dilakukan untuk memberikan pemahaman terkait bahaya narkotika terhadap kesehatan. Selain itu narkotika dapat merusak masa depan remaja itu sendiri dan juga bangsa. Tidak saja ingin memberikan pemahaman bahaya narkotika itu, BNNK ingin agar mahasiswa menjadi relawan atau berpartisipasi

menyadarkan orang terdekat di lingkungannya, bila ada yang terpapar narkotika itu. Caranya mengajak para pengguna itu mengikuti rehabilitasi melalui klinik rehabilitasi. Dari kampus ini dikampanyekan gerakan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran narkotika. "Target besarnya kita ingin mahasiswa menjadi relawan. Kalau ditemukan korban narkotika agar difasilitasi untuk direhabilitasi di klinik kita," harapnya.

Perwira asal Desa Temukus, Banjar ini mengatakan, hingga sekarang, BNNK sudah menerima 64 orang pecandu narkotika yang mengikuti program rehabilitasi. Puluhan pecandu ini tersebar di sembilan kecamatan di Buleleng. Bahkan, latar belakang mereka beragam. Mulai karyawan swasta, PNS, mahasiswa, dan pelajar. Pecandu itu sendiri berhasil direhab setelah BNNK melancarkan pendekatan dengan melibatkan semua lapisan masyarakat. Peran mahasiswa agar mereka berpartisipasi pada program rehabilitasi itu penting, sehingga jika di lingkungan terdekatnya ditemukan ada indikasi penyalahgunaan narkotika, maka bisa dirujuk mengikuti rehabilitasi itu. Pengobatan dengan rehabilitasi ini sangat efektif. "Untuk mengoptimalkan program rehab ini, kami ingin mengundang mahasiswa di Undiksha dan kampus-kampus lain di Buleleng," harapnya. (kmb38)

BAGIAN H

BULELENG



KLIPING BERITA MEDIA CETAK KAB BULELENG

Nama Media : Bali Post

Kategori : Kamtibmas

Pascabom Bunuh Diri di Medan

Polres Tingkatkan Penjagaan

Singaraja (Bali Post) -

Menyusul ledakan bom bunuh diri di Mapolrestabes Medan, penjagaan di Polres Buleleng diperketat. Tercatat 26 petugas gabungan dari Binmas, Reskrim, Intel, Sabhara, Patroli, hingga Lantas dikerahkan secara bergiliran untuk melakukan penjagaan ketat selama 24 jam.

Pantauan di lapangan Rabu (13/11) kemarin, siaga penjagaan di pintu masuk Polres Buleleng ini dilakukan oleh sejumlah anggota polisi bersenjata lengkap. Tampak petugas memeriksa setiap tamu maupun warga yang datang, baik yang hendak membuat Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), atau yang ingin

membuat pengaduan. Barang yang dibawa pengunjung, seperti tas dan jaket digeledah ketat. Setelah barang-barang yang dibawa itu aman, baru pengunjung itu diizinkan masuk ke Mapolres Buleleng.

Kabag Ops Polres Buleleng, Kompol A.A. Wiranata Kusuma mengatakan, pemeriksaan barang yang dibawa

pengunjung itu diharapkan tidak dianggap berlebihan oleh masyarakat. Sebab, ini merupakan langkah antisipasi yang perlu dilakukan agar peristiwa ledakan bom yang terjadi di Polrestabes Medan itu tidak terjadi khususnya di Buleleng. "Tindakan seperti itu demi keselamatan kita bersama. Biar kita semua nyaman. Penting agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di Buleleng khususnya," harapnya.

Mantan Kapolsek Kota Si-

ngaraja itu mengimbau kepada masyarakat Buleleng yang ingin ke Polres agar membuka jaketnya terlebih dahulu. Selain itu tidak diperkenankan mengenakan kacamata hitam. Penjagaan ketat itu dilakukan sampai situasi kondusif kembali.

"Polsek-Polsek di Buleleng juga sudah diperintahkan melakukan penjagaan ketat. Selain itu, setiap barang yang dibawa pengunjung juga diperiksa," tegasnya. (kmb38)

Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi

∞ BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL - SETDA KABUPATEN BULELENG ∞



KLIPING BERITA MEDIA CETAK KAB BULELENG

Nama Media : *BALI POST*

Kategori : *JAMINAN KESEHATAN*

Dewan Usulkan Berhenti dari Kepesertaan BPJS

Buat Jaminan Kesehatan Sendiri dari Dana PAD

Singaraja (Bali Post) -

Munculnya persoalan pelik yang masih menghambat pelaksanaan jaminan kesehatan yang dikelola Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), membuat lembaga dewan di Buleleng menawarkan alternatif. Agar masalah itu nantinya tidak merugikan masyarakat, salah satu alternatifnya adalah pemerintah daerah berhenti dari kepesertaan BPJS itu. Sebagai penggantinya, dewan menawarkan pemerintah membuat program jaminan kesehatan dengan dana dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Usul tersebut terungkap dalam rapat yang membahas Rancangan Kegiatan dan Anggaran (RKA) Rancangan APBD Buleleng Tahun 2020 di gedung DPRD Buleleng, Rabu (13/11) kemarin. Rapat itu dipimpin Wakil Ketua DPRD Ketut Susila Umbara bersama anggotanya. Sementara eksekutif dipimpin Sekkab Buleleng Ir. Dewa

Ketut Puspaka, M.P. bersama pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Dalam rapat itu anggota DPRD Fraksi PDI Perjuangan Ni Kadek Turkini mengatakan, sejak kebijakan secara nasional mewajibkan pemerintah daerah telah mengalokasikan *sharing* anggaran untuk membiayai jaminan kesehatan masyarakat

miskin itu. Karena semakin banyak warga yang harus dijamin. Selain itu masih banyak penduduk yang tercecer. Hal itu justru membuat anggaran semakin bertambah. Terkait situasi pelik terbaru, di mana kebijakan pemerintah pusat menyesuaikan nilai iuran peserta BPJS. Diyakini hal itu cukup membebani APBD. Persoalan lainnya

juga muncul, yakni RSUD Buleleng mengalami kerugian karena klaim pertanggungjawaban dari BPJS belum kunjung dilunasi.

"Setelah kita membahas RKA OPD termasuk dengan RSUD memang kondisinya seperti itu. Rumah sakit jadi merugi karena klaim pertanggungjawaban dari BPJS ini belum dilunasi. Persoalan lainnya ada kenaikan iuran BPJS itu justru dapat membebani keuangan di daerah," katanya.

Atas peliknya persoalan yang terjadi, maka Turkini mengusulkan pemerintah harus mengambil langkah-langkah serius. Sehingga komitmen untuk menjamin kesehatan masyarakat miskin itu bisa dilakukan dengan optimal. Karena itu, dia pun menawarkan, pemerintah perlu mengambil langkah tegas. Caranya berhenti menjadi kepesertaan BPJS. Sebagai penggantinya, warga miskin di daerah ini diberikan jaminan kesehatan yang dananya berasal dari pendapatan asli daerah (PAD). Ini memungkinkan dilakukan, karena Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali sendiri memiliki program jaminan kesehatan itu. "Kami mengusulkan keluar saja dari program BPJS itu. Sebagai gantinya, kita buat jaminan kesehatan



BAHAS RKA - DPRD Buleleng membahas Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Rancangan APBD Buleleng Tahun 2020, Rabu (13/11) kemarin. Bali Post/kmb38

Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi

~ BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL - SETDA KABUPATEN BULELENG ~



KLIPING BERITA MEDIA CETAK KAB BULELENG

Nama Media :

Kategori :

SAMBUNGAN

di daerah sendiri. Kabupaten lain sudah ada yang melakukan itu. Sedangkan Pemprov Bali juga punya program jaminan kesehatan, sehingga itu bisa dipakai," harapnya.

Hal senada diungkapkan Ketua Komisi IV DPRD Buleleng Luh Hesti Ranitasari, Politisi Partai Demokrat asal Desa Tamblang, Kubutambahan itu juga sepakat membuat jaminan kesehatan mandiri yang dibiayai PAD. Hal ini bisa dialokasikan untuk *cover* penduduk miskin yang belum terdaftar dalam JKN-KIS. Tidak saja penduduk yang belum di-*cover* JKN KIS. Jaminan yang sifatnya tersendiri itu penting dibuat guna mengakomodir penduduk Buleleng yang datanya dinonaktifkan karena tidak masuk Basis Data Terpadu (BDT) pemerintah pusat.

Terkait bertentangan regulasi itu, Ranitasari menyebut, hal ini bisa dikomunikasikan lebih lanjut. Kalau tidak salah ada 36.000 lebih penduduk yang belum di-*cover* JKN KIS dan ditambah penduduk yang tidak masuk dalam BDT pusat itu perlu ditanggung, karena itulah diusulkan untuk membuat jaminan kesehatan tersendiri. "Pada intinya, kita ingin konsepnya seperti JKBM dulu," katanya. (kmb38)



KLIPING BERITA MEDIA CETAK KAB BULELENG

Nama Media : BALI POST

Kategori : PERDA SAMPAH

Soal Penerapan Perda Pengelolaan Sampah

Warga Melanggar Diganjar Sidang Tipiring



Putu Dana

Desakan Komisi II DPRD Buleleng agar menerapkan Perda No. 1 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah ditanggapi pemerintah daerah. Buktinya, jajaran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) bersama Tim Yustisi akan melancarkan patroli secara terjadwal. Dalam patroli ini kalau ditemukan warga yang melanggar perda, maka Satpol PP akan memproses berkas pelanggaran tersebut untuk ditindaklanjuti dalam perkara sidang tindak pidana ringan (tipiring) di Pengadilan Negeri (PN) Singaraja. Sejauh ini, upaya apa saja yang sudah dilakukan guna mengaplikasikan sanksi itu kepada masyarakat?

KEPALA Satuan Polisi Pamong Praja (Kasatpol PP) Putu Dana mengungkapkan hal itu di sela-sela rapat membahas RKA Rancangan APBD Buleleng tahun 2020 di Gedung DPRD Buleleng, Rabu (13/11) kemarin. Perda pengelolaan sampah itu kata Putu Dana telah disosialisasikan kepada masyarakat. Sejauh ini, malah sudah dilakukan persiapan melaksanakan amanat regulasi tersebut. Salah

satunya persiapan personel yang nantinya diterjunkan pada patroli ke lokasi pembuangan sampah di Kota Singaraja dan sekitarnya. Selain itu, Aparatur Sipil Negara (ASN) yang sudah memiliki sertifikat sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) juga sudah dipersiapkan. Tim pelaksana perda ini nantinya digabungkan dalam Tim Yustisi termasuk menambatkan PPNS yang bertugas di

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Buleleng. "Kami sudah bahas dan juga persiapan personelnnya termasuk ada tambahan PPNS dari DLH. Mereka nantinya yang memproses berkas pelanggaran yang ditemukan di lapangan," katanya.

Birokrat asal Desa Pengelatan, Kecamatan Buleleng itu menambahkan, pola yang akan dilakukan dalam upaya mengaplikasikan amanat perda itu adalah melalui patroli ke lokasi pembuangan sampah resmi atau tempat yang selama ini sering dijadikan warga membuang sampah sembarangan. Kalau dalam patroli itu ditemukan warga membuang sampah tidak pada tempatnya, maka petugas akan memproses berkas pelanggaran hukumnya. Kemudian akan disidangkan di PN Singaraja.

Selain itu, Satpol PP atau Tim Yustisi juga akan menerima pengaduan masyarakat yang

menemukan terjadi pelanggaran perda itu. Hanya, pelaporan warga ini harus didukung bukti berupa foto atau video warga yang membuang sampah sembarangan itu. Selain itu, warga yang mengadukan pelanggaran itu diminta siap menjadi saksi dalam pelanggaran itu. "Dua cara ini kami lancarkan dalam melaksanakan amanat perda itu. Hasilnya nanti kita lihat. Penerapannya harus dilakukan untuk memberikan efek jera, sehingga penanganan persampahan di daerah kita bisa lebih baik," harapnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Komisi II DPRD Buleleng menyoroti kebijakan penanganan sampah sejalan program "Buleleng Bebas Sampah Plastik". Agar target itu tercapai maksimal, pemerintah daerah harus menerapkan Perda No. 1 Tahun 2013.

Ketua Komisi II Putu Mangku

Budiasa mengatakan, instansi yang diberi wewenang mengeksekusi amanat perda itu mulai melaksanakan tugasnya. Kalau sanksi yang sudah diatur dalam perda itu diterapkan, dirinya yakin *action* nyata itu dapat memberi efek jera, sehingga perilaku membuang sembarangan itu bisa dikendalikan secara perlahan.

Sebelum amanat perda itu diterapkan, pemerintah telah menyiapkan sarana dan prasarannya. Hanya, persiapan infrastruktur, peralatan, dan sumber daya manusia (SDM) itu perlu ditingkatkan lagi. Kondisi ini dinilai tidak lagi menjadi alasan, sehingga penerapan perda belum dilakukan. Karena itu, pihaknya menyarankan desa atau kelurahan yang sudah memiliki sarana, prasarana dan SDM, maka wajib mengikuti setiap amanat perda termasuk turunannya yaitu peraturan bupati (perbup). (mud)

Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi

BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL - SETDA KABUPATEN BULELENG